

==Weekly Tax Updates==

PMK Nomor 43 Tahun 2026 mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100% untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi selama periode libur sekolah Tahun Anggaran 2026.

Peraturan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas liburan.

- **Besaran Insentif:** PPN gratis atau ditanggung pemerintah sebesar 100%.
- **Tanggal Berlaku Aturan:** Mulai 22 Juni 2026 hingga 5 Juli 2026.

Syarat Mendapatkan PPN Gratis Tiket Pesawat

- **Rute Penerbangan:** Hanya untuk penerbangan domestik (dalam negeri).
 - **Kelas Penerbangan:** Terbatas pada penerbangan kelas ekonomi.
 - **Periode Pembelian Tiket:** Tiket harus dibeli dalam rentang waktu berlakunya PMK, yaitu sejak 22 Juni hingga 5 Juli 2026.
 - **Periode Penerbangan:** Tanggal keberangkatan pesawat harus berada di antara 24 Juni hingga 5 Juli 2026.
- Jika salah satu kriteria di atas tidak terpenuhi, maka tarif tiket pesawat akan tetap dikenakan PPN normal sesuai aturan perpajakan yang berlaku.



DJP Tunjuk 7 Pemungut Pajak Digital Baru, Ada Strava

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menunjuk tujuh entitas baru sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Tujuh entitas itu ialah Strava, Inc., Envato Pty Ltd, Envato Elements Pty Ltd, The Nielsen Norman Group, Inc., Kling AI Pte. Ltd., Law School Admission Council, Inc., dan PLAUD LLC. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan deretan entitas tersebut bergerak di berbagai sektor ekonomi digital, termasuk layanan kebugaran, konten digital, pendidikan, dan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI).

DJP Jabar I Sita Aset Rp12,06 Miliar Milik 80 Penunggak Pajak

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I menyita 106 aset milik 80 penunggak pajak dengan nilai taksiran mencapai Rp12,06 miliar dalam rangkaian kegiatan Pekan Sita Serentak yang berlangsung pada 22–26 Juni 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari aksi serentak tiga kantor wilayah DJP di Provinsi Jawa Barat, yakni Kanwil DJP Jawa Barat I, Jawa Barat II, dan Jawa Barat III, untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus mengamankan penerimaan negara. Secara keseluruhan, ketiga kantor wilayah menyita 288 aset milik wajib pajak dengan total nilai taksiran mencapai Rp54,06 miliar. Aset yang disita terdiri atas barang bergerak maupun tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, rekening bank, uang tunai, hingga perhiasan.





Apindo Harap Penerapan Pajak E-Commerce Dilakukan Bertahap

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai rencana penerapan pemungutan pajak penghasilan (PPH) melalui *marketplace* mulai Juli 2026 bukan merupakan kebijakan baru. Namun, dunia usaha berharap implementasi kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap. Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, pelaku usaha telah mengetahui rencana kebijakan tersebut sebelumnya sehingga tidak lagi menjadi hal baru bagi industri. Adapun, Apindo juga telah menyampaikan berbagai masukan teknis kepada pemerintah sebelum kebijakan tersebut ditegaskan.

Purbaya Mau Kasih Insentif Pajak Rusun Subsidi MBR, Ini

Bocorannya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah menyepakati penggunaan mekanisme Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebagai solusi transisi untuk mendukung implementasi pembiayaan rumah susun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia mengatakan, melalui berbagai instrumen pembiayaan dan dukungan fiskal itu, akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak dan terjangkau akan semakin terbuka.



Purbaya Sidak Pabrik Baja Asal China, Cek Dugaan Pajak Tak Wajar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu perusahaan baja asal Tiongkok yang beroperasi di kawasan Pulogadung. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memeriksa dugaan ketidaksesuaian antara besarnya aktivitas usaha perusahaan dengan pajak yang dilaporkan. Purbaya mengatakan, pemerintah ingin memastikan seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia menjalankan kewajiban perpajakan sesuai aturan. Langkah ini juga bertujuan menjaga persaingan usaha yang sehat di industri nasional.

Mendag Jamin NIB Wajib Seller E-Commerce Tak

Berhubungan dengan Pajak

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, kewajiban memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di platform e-commerce tidak terkait dengan pungutan pajak. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari aturan baru perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), yang bertujuan memperkuat legalitas usaha para penjual daring. Sebagaimana diketahui, kewajiban NIB diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mulai berlaku pada 8 Juni 2026.

